

Aparat Polres Jaksel Ungkap Pesta Seks di Apartemen, Sejumlah Orang Ditangkap

JAKARTA (IM) – Jajaran Polres Metro Jakarta Selatan mengungkap adanya pesta seks atau orgy di salah satu apartemen di kawasan Jakarta Selatan. Beberapa orang diamankan oleh polisi.

Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi mengungkapkan, pihak yang diamankan yakni dari pihak event organizer (EO) “Ada dari EO yang diamankan,” kata Ade Ary saat dihubungi wartawan, Selasa (12/9).

Ade Ary menjelaskan, kasus ini terungkap setelah adanya pengaduan dari masyarakat yang langsung disampaikan kepadanya melalui pesan WhatsApp.

“Ada yang WA ke saya, dia ngasih tahu pak ini ada pesta seks di sini. Kemudian saya perintahkan kasat reskrim untuk selidiki, ternyata benar,” jelasnya.

Secara terpisah, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Bintoro membenarkan

adanya pengungkapan kasus pesta seks tersebut. Ia mengatakan para pelaku ditangkap di sebuah apartemen di kawasan Jakarta Selatan.

“Diamankan di apartemen di kawasan Semanggi, Jakarta Selatan,” kata Bintoro.

Bintoro pun belum menjelaskan secara rinci terkait pengungkapan kasus pesta seks di salah satu apartemen di kawasan Jakarta Selatan tersebut.

Dilansir dari berbagai informasi, pesta seks atau orgy adalah ketika empat orang atau lebih berada di dalam satu tempat, melakukan hubungan seks saling bergantian.

Pesta orgy ini terkuak usai beredar undangan di media sosial. Dalam undangan tersebut, para peserta, wajib membayar sebesar Rp 1 juta untuk bergabung dalam pesta seks tersebut.

Selain itu, para peserta diwajibkan untuk membawa alat kontrasepsi, tidak menggunakan obat kuat, serta wangi dan bersih. • lus

FOTO: ANTARA



OPERASI ZEBRA CANDI DI SALATIGA GUNAKAN DRONE

Anggota Ditlantas Polda Jawa Tengah mempersiapkan drone saat Operasi Zebra Candi di Salatiga, Jawa Tengah, Selasa (12/9). Ditlantas Polda Jawa Tengah bersama Satlantas Polres Salatiga melakukan Operasi Zebra Candi dengan menggunakan teknologi Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) drone sehingga dapat mempermudah dalam menindak pelanggaran lalu lintas yang diharapkan dapat meningkatkan kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas.

Satgas Pangan Polri Pastikan Stok Beras Aman untuk Cukupi Kebutuhan Masyarakat

Satgas Pangan Polri sudah mengecek gudang-gudang penggilingan padi, dan toko-toko retail modern untuk memastikan bahwa stok beras masih aman.

JAKARTA (IM) - Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri memastikan stok beras di Tanah Air aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal ini disampaikan Kepala Satgas Pangan Polri Brigjen Whisnu Hermawan di tengah adanya rencana impor beras.

“Berdasarkan pengecekan yang dilakukan oleh Satgas Pangan Polri untuk stok beras saat ini dalam kondisi aman dan dapat mencukupi

untuk memenuhi kebutuhan masyarakat,” kata Whisnu dalam keterangannya, Selasa (12/9).

Whisnu menyebut kenaikan harga yang terjadi pada jenis beras medium. Hal ini lantaran jenis beras medium lebih banyak peminatnya dibanding beras premium.

“Sampai saat ini perkembangan ketersediaan stok beras di daerah sentra produksi juga masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan di

wilayah lain,” katanya menegaskan.

Menurut Whisnu, Satgas Pangan juga sudah mengecek gudang-gudang penggilingan padi, beberapa pasar tradisional dan toko-toko retail modern untuk memastikan bahwa stok beras masih aman. Dia juga mengimbau masyarakat tenang serta tidak panik.

“Upaya lain yang dilakukan satgas pangan Polri yaitu dengan pengecekan ketersediaan dan menjaga kelancaran jalur pendistribusian,” tuturnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya meminta masyarakat tidak usah khawatir karena stok beras

di Indonesia masih cukup. Jokowi juga mengungkapkan rencana pemerintah kembali melakukan impor beras untuk menjaga cadangan beras nasional.

Selain itu, impor beras juga dilakukan untuk menjaga agar harga beras tidak naik.

“Iya (kemungkinan impor beras lagi). Ini untuk memastikan bahwa kita memiliki cadangan strategis stok (beras). Harus (impor) untuk menjaga agar tidak terjadi kenaikan (harga),” ujar Jokowi usai meninjau Gudang Bulog Dramaga di Kabupaten Bogor, Senin (11/9).

Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi juga menyinggung soal impor beras dari Kamboja sebanyak 250 ribu ton. Jokowi mengatakan, impor beras dari Kamboja saat ini masih dalam proses

perjalanan. Adapun impor beras sebanyak 250 ribu ton dari Kamboja itu merupakan bagian dari keseluruhan impor beras sebanyak 400 ribu ton pada tahun ini.

Mantan Wali Kota Solo ini mengungkapkan, beras dari Kamboja itu akan disalurkan ke gudang-gudang Bulog di berbagai daerah. Nantinya, Jokowi mengatakan, pengiriman paling lambat akan tiba pada November 2023.

Meski begitu, Jokowi mengatakan, sebenarnya stok beras di Tanah Air saat ini sudah banyak. Tetapi, pemerintah masih melihat potensi kebutuhan tahun depan.

“Stoknya, stok kita sudah banyak tetapi kita tetap masih melihat di mana yang bisa kita beli untuk tidak sekarang untuk plan tahun depan juga untukantisipasi,” kata Jokowi.

• lus



FOTO: ANTARA

POLRES LOMBOK SALURKAN AIR BERSIH

Aparat kepolisian Polres Lombok Barat menyalurkan air bersih di Dusun Penanggak, Desa Batulayar, Kecamatan Batulayar, Lombok Barat, NTB, Selasa (12/9). Menurut data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB, sebanyak 577.025 jiwa warga di 335 desa di NTB saat ini mengalami kesulitan air bersih akibat dampak kekeringan.

Bareskrim Limpahkan Tersangka Kasus Penggelapan Asuransi Jiwa Kresna ke Kejagung

JAKARTA (IM) - Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri telah merampungkan berkas perkara kasus dugaan penggelapan PT Asuransi Jiwa Kresna.

Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen Whisnu Hermawan menyebut, pihaknya telah melimpahkan Tersangka KS dan barang bukti ke Kejaksaan Agung (Kejagung), setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P21.

“Pada tanggal 5 september 2023 berdasarkan surat Dittipideksus Bareskrim Polri nomor : B/76/IX/RES.1.11/2023/DIT-TPIDEKSUS, telah dilakukan pelimpahan tersangka dan barang bukti kepada Kejaksaan Agung RI,” kata Whisnu kepada wartawan di Jakarta, Selasa (12/9).

Kejaksaan Agung sendiri pada tanggal 4 September 2023 telah menyatakan berkas perkara itu telah lengkap atau P-21, berdasarkan surat Kejaksaan Agung Republik Indonesia nomor: b-3508/e.3/eku.1/09/2023, berkas perkara nomor: BP/105/IX/RES.1.11/2022/DIT-TPIDEKSUS, 16 September 2022.

Dalam hal ini, Whisnu menyebut bahwa, terdapat sembilan laporan polisi yang masuk dengan terlapor sekaligus Tersangka KS.

Adapun, modus dari kasus ini adalah menginvestasikan premi dari produk asuransi k-lita atau kresna link investa dan pik atau protecto investa kresna di saham/efek terafiliasi yang melebihi ketentuan OJK.

“Tidak memberita-

hukan atau melaporkan kepada pemegang polis tentang perkembangan investasi atau nilai aktiva bersih,” ujar Whisnu.

Menurut Whisnu, jumlah korban sebanyak 278 orang dan kerugian sebanyak kurang lebih Rp431 miliar.

Dalam perkara ini tersangka KS, dikenakan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian dan/atau Pasal 378 KUHP dan/atau Pasal 372 KUHP dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Sementara itu, terkait dengan perkara group Kresna lainnya yaitu Kresna Sekuritas, penyidik pada tanggal 11 September 2023 telah melakukan gelar perkara.

Hasil gelar perkara itu memutuskan bahwa, MS selaku Owner Group Kresna ditetapkan sebagai tersangka. Sebelumnya penyidik telah menetapkan tiga tersangka lainnya yaitu OB, EH dan MTS.

“Untuk perkara terkait gagal bayar para nasabah korban yang menempatkan dana pada PT Pusaka utama persada dan PT Makmur Sejahtera Lestari selaku perusahaan yang digunakan untuk menerima dana para nasabah korban dengan bentuk perjanjian jual beli saham menggunakan PT Kresna Sekuritas,” papar Whisnu.

Dalam perkara ini para tersangka dikenakan Pasal 103 jo 30 UU Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan atau Pasal 378 KUHP dan atau Pasal 372 KUHP dan Pasal 3,4,5 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU. • lus

BNN Pastikan Pemberantasan Narkoba dengan Cara-Cara Extraordinary

JAKARTA (IM) - Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Petrus Golose memastikan pemberantasan narkoba di Tanah Air dilakukan secara extraordinary atau luar biasa. Langkah ini serupa dengan cara pemerintah ketika menangani inflasi dan stunting.

Pernyataan ini disampaikan Petrus usai mengikuti rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo yang membahas soal narkoba di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (11/9).

Petrus mengatakan, dalam rapat terbatas tersebut, Presiden telah memberikan arahan ke jajaran di bawahnya mengenai penanganan narkoba.

“Untuk penanganan narkotika akan dilaksanakan secara extraordinary. Secara extraordinary sama dengan pelaksanaan kita melaksanakan penanganan terhadap inflasi dan juga stunting,” ujar Petrus.

Petrus mengatakan bah-

wa ada 10 daerah yang masuk dalam skala prioritas penanganan secara luar biasa terkait pemberantasan narkoba. Salah satunya adalah Sumatera Utara. Penanganan secara extraordinary yang dimaksud nantinya tetap dalam koridor penegakan hukum, pencegahan dan rehabilitasi.

Terlebih, saat ini angka prevalensi pengguna narkoba di Indonesia mencapai 1,95 persen atau setara dengan 3,66 juta orang.

“Ini yang menjadi catatan bagi kita. Dan kalau kita lihat bersama bahwa terutama di Sumut, jumlah tahanan atau narapidana sangat tinggi di dalam lembaga pemasyarakatan (lapas). Berarti juga banyak pengguna yang harus kita rehabilitasi,” ungkap Petrus.

Presiden Jokowi sebelumnya mengatakan, kasus penyalahgunaan narkoba yang melibatkan sekitar 3,6 juta jiwa menyebabkan lapas mengalami kelebihan

kapasitas.

“Oleh sebab itu pada siang hari ini, saya ingin mengajak kita semua untuk mencari sebuah lompatan, terobosan agar kejahatan luar biasa ini bisa kita kurangi, kita selesaikan dengan baik,” jelas Jokowi saat memberikan pengantar pada rapat terbatas soal narkoba pada Senin (11/9) siang.

Jokowi menuturkan, dirinya sudah berbicara dengan sejumlah aparat terkait di daerah untuk melakukan penanganan narkoba. Jokowi juga menegaskan bahwa penegakan hukum harus lebih tegas terhadap kasus penyalahgunaan narkoba. Sebab aparat penegak hukum juga ada yang terlibat di dalam peredaran narkoba.

“Kita tahu juga banyak oknum aparat penegak hukum kita yang di dalamnya. Ini menjadi catatan dan tindakan tegas harus diberikan kepada mereka,” tutur Presiden. • lus



FOTO: ANTARA

PEMUSNAHAN SABU SELUNDUPAN DARI MALAYSIA

Direktur Reserse Narkoba Polda Kalbar Kombes Pol Thelly Iskandar Muda (kiri) bersama Kasi Pidum dan TPUL Kejati Kalbar Bangun Dwi Sugiartono (tengah) dan Pasi Intel Kodim 1204/Sanggau Kapten CZI Sapto Wiyono (kanan) membuka bungkus barang bukti sabu saat rilis kasus dan pemusnahan di Pontianak, Kalimantan Barat, Selasa (12/9). Tim Interdiski Terpadu Kalimantan Barat memusnahkan 7,6 kilogram sabu asal Malaysia yang merupakan hasil sitaan dari dua kurir berinisial AS dan RB yang dibekuk di Kabupaten Sanggau serta Kota Pontianak.

Berkas Kasasi Eks Kapolda Sumbar Atas Vonis Seumur Hidup Diterima MA

JAKARTA (IM) - Mahkamah Agung (MA) telah menerima berkas kasasi terdakwa hukuman penjara seumur hidup, Teddy Minahasa, dari Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat (Jakbar), Senin (11/9).

Sebagai informasi, pengadilan tingkat pertama dan banding menghukum eks Kapolda Sumatera Barat itu penjara seumur hidup terkait kasus peredaran Narkoba.

“Sudah. Nomor 5206 (nomor perkara),” ujar Kepala Biro Hukum dan Humas MA, Sobandi kepada wartawan, Selasa, (12/9).

Berdasarkan situs MA, perkara nomor 5206 K/Pid.Sus/2023 telah masuk pada Senin (11/9). Statusnya, dalam proses distribusi.

“Usia perkara tidak diketahui karena tanggal distribusi berkas belum diisi,” tulis dalam situ MA.

Sebelumnya diberitakan, PN Jakbar telah mengirimkan berkas kasasi terdakwa kasus peredaran narkoba Teddy Minahasa ke Mahkamah Agung (MA). Berkas putusan penjara seumur hidup Teddy Minahasa itu telah dikirim pada Rabu 30 Agustus 2023 lalu.

“Rabu, 30 Agustus 2023. Pengiriman berkas Kasasi,” dikutip dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan (SIPP) PN Jakbar, Senin, (11/9).

Berkas perkara nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Br itu dikirim menyusul permohonan kasasi yang diajukan mantan Kapolda Sumatera Barat tersebut pada Selasa (25/8).

Teddy juga sebelumnya telah mengajukan banding, namun ditolak. Dia pun tetap dijatuhi hukuman penjara seumur hidup.

Kepala Biro Hukum dan Humas MA, Sobandi mengatakan bahwa dirinya akan mengecek berkas tersebut. Dia mengakui belum mengetahui keberadaan berkas itu.

“Saya cek nanti ya. Saya harus cek, apakah sudah diterima di Mahkamah Agung (MA) atau belum, tapi secara ini akan diberitahukan ke pengadilan (PN Jakbar) asal pengirim berkas itu,” ujarnya kepada MNC Portal Indonesia.

Ketika disinggung bahwa PN Jakbar telah menginformasikan berkas tersebut telah dikirim pada 30 Agustus 2023, Sobandi pun berharap MA telah menerimanya.

“Mudah-mudahan sudah diterima lalu dibentuk tim pemilih untuk memeriksa perlengkapan Berkasnya kemudian nanti dapat nomor perkara, majelis hakim setelah itu pengucapan musyawarah dan putusannya,” jelasnya.

Sobandi menjelaskan, bahwa MA akan memeriksa dan mempelajari berkas tersebut apabila sudah diterima. Pemeriksaan yang dilakukan terkait dengan kelengkapan berkas.

“Nanti Mahkamah Agung akan menelaah dulu berkasnya sudah lengkap apa belum apa ada kesalahan administrasi atau enggak,” katanya.

“Lalu Mahkamah Agung akan membuat nomor perkara dulu diregister di daftar dengan nomor perkara dan ditetapkan oleh majelis hakim,” tambah Sobandi.

Setelah itu, hakim akan melakukan pengucapan putusan. Kata dia, pengucapan putusan paling lama dilakukan tiga bulan setelah berkas diterima.

Sebelumnya diberitakan Teddy Minahasa divonis seumur hidup penjara karena dinyatakan bersalah menaruh barang bukti sabu dengan tawar dalam kasus narkoba.

Vonis PN Jakarta Barat yakni Teddy Minahasa divonis seumur hidup penjara, Dody Prawiranegara divonis 17 tahun penjara, Linda Pudjiastuti divonis 17 tahun penjara, dan Kasranto divonis 17 tahun penjara. • lus